

Media Online	Radarkudus.jawapos.com
Tanggal	29 Oktober 2024
Wilayah	Kabupaten Rembang



Duh! APBD 2024 Rembang Defisit, Uang Harian Dewan Senilai Rp 1,5 Miliar Belum Terbayar

<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695250076/duh-apbd-2024-rembang-defisit-uang-harian-dewan-senilai-rp-15-miliar-belum-terbayar>

REMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang masih menghadapi masalah dalam pembayaran uang harian untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024.

Tunggakan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,5 miliar ini disebabkan oleh **defisit anggaran** yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2024.

Menurut laporan sebelumnya dari Jawa Pos Radar Kudus, **defisit** anggaran disebabkan oleh ketidaksesuaian antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD tahun sebelumnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa asumsi SILPA yang ditetapkan sebesar Rp 66 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 19 miliar.

Di samping itu, Kabupaten Rembang juga tidak melaksanakan APBD Perubahan untuk tahun ini, dan Pemkab berencana mengatasi defisit melalui pergeseran anggaran.

Puji Santoso, anggota DPRD Rembang dari Partai Gerindra, menjelaskan bahwa tunggakan uang harian untuk kunjungan kerja dan konsultasi anggota dewan masih belum terbayarkan sepenuhnya.

"Ini semua karena dampak defisit keuangan. Ketika keuangan daerah defisit, capaian pendapatan tidak terealisasi. Kami terus memantau kondisi ini," ujarnya.

Puji menyebutkan bahwa sekitar Rp 1,5 miliar dari total tunggakan tersebut berasal dari uang harian yang seharusnya dibayarkan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan di periode sebelumnya.

"Ada uang kunjungan kerja dan uang konsultasi. Mereka (anggota DPRD) sudah melaksanakan tugas, tetapi hingga kini belum terbayar karena kondisi keuangan," jelasnya.

Jumlah tunggakan ini sebelumnya sempat mencapai Rp 3 miliar, dan pihak DPRD hanya mampu menagih sekitar Rp 800 juta setiap bulan.

"Estimasi saat ini sekitar Rp 1,5 miliar, karena rekan-rekan di komisi sedang berkomunikasi," tambahnya.

Biasanya, uang harian ini sudah diterima oleh anggota dewan sebelum mereka melaksanakan kunjungan kerja.

Namun, Puji menjelaskan bahwa sampai bulan Oktober ini, fokus Pemerintah Daerah adalah pada pembayaran gaji pegawai.

Oleh karena itu, pihaknya masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Dibandingkan dengan kabupaten lain yang kondisi APBD-nya normal, biasanya uang harian sudah dibayarkan secara penuh sebelum DPRD melakukan kunjungan kerja atau konsultasi. Namun, saat ini kondisi kita berbeda," tutup Puji. **(vah/khim)**